



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pangeran Antasari No. 1 Telpn (0526) 2021035 Fax. (0526) 2021510
TANJUNG

Kode Pos 71500

Nomor : B. 01 /Setda-BPBJ/500/01/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Penugasan Personel Bagian PBJ Setda Tabalong
sebagai Pejabat Pengadaan di Perangkat Daerah
pada Tahun Anggaran 2025

Tanjung, 02 Januari 2025

Kepada Yth.

Seluruh Pimpinan Perangkat
Daerah (Terlampir)

Di
Tanjung

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Pasal 74, Pasal 74A dan Pasal 74B Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka ditugaskan personel dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong dengan daftar nama sebagaimana tercantum pada lampiran surat ini untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan pada Perangkat Daerah masing-masing.

Sebelum dimulainya proses pengadaan barang/jasa maka Perangkat Daerah harus menetapkan Pejabat Pengadaan melalui Surat Keputusan dari Pengguna Anggaran di Perangkat Daerah masing-masing. Segala biaya terkait penugasan tersebut menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui :

Asisten Perekonomian dan
Pembangunan,



NORZAIN AKHMAD YANI, M.Si
NIP. 19651219 199603 1 001

Kabag PBJ Setda Tabalong,

MUHAMAD ARIEF KURNIAWAN, ST
NIP. 19740721 200901 1 002

Tembusan:

Pejabat Fungsional yang ditugaskan

Daftar Penugasan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pejabat Pengadaan
Di Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	Personel PBJ	Perangkat Daerah	Uraian Tugas
1	Syarif Hidayat, SST, MP 19720409 199803 1 004 Pembina (IV/a) Pengelola PBJ Ahli Muda	1. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung Langsung;
2	H. Zain Lukman Hakim, SST 19750314 199303 1 004 Penata Tk.1 (III/d) Pengelola PBJ Ahli Muda	2. Badan Pendapatan Daerah 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3	Fahrurazi, ST 19720116 200501 1 012 Penata Tk.1 (III/d) Pengelola PBJ Ahli Muda	6. Inspektorat 7. Sekretariat DPRD 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
4	Muhammad Husain, ST 19740102 199703 1 002 Penata Tk.1 (III/d) Pengelola PBJ Ahli Muda	11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 12. Dinas Kesehatan (hanya sumber dana APBD)	
5	H. Akhmad Munazir, ST 19800607 201001 1 023 Penata Tk.1 (III/d) Pengelola PBJ Ahli Muda	13. Dinas Perhubungan 14. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
6	Hendra Yudha Gunawan, ST 19830917 200904 1 001 Penata Tk.1 (III/d) Pengelola PBJ Ahli Muda	15. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 16. Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	
7	Hidayatul Fitri, S.Sos 19750712 200604 1 028 Penata Tk.1 (III/d) Pengelola PBJ Ahli Muda	17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 18. Dinas Perkebunan dan Peternakan	
8	Khairul Mashudi, SE 19820116 201001 1 022 Penata (III/c) Pengelola PBJ Ahli Muda	19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 20. Dinas Tenaga Kerja 21. Dinas Lingkungan Hidup 22. Dinas Komunikasi dan Informatika	
9	Agus Dwi Admojo, ST 19800815 201001 1 012 Penata Muda Tk. I (III/b) Pengelola PBJ Ahli Pertama	23. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 24. Dinas Sosial 25. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
10	Syamsir Rahman, SP 19791210 200312 1 007 Penata Muda Tk. I (III/b) Pengelola PBJ Ahli Pertama	26. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 27. RSUD H. Badaruddin Kasim (hanya sumber dana APBD) 28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 29. Sekretariat Daerah	
11	Fathur Rakhman, S. AP 19820516 201001 1 027 Penata Muda Tk. I (III/b) Pengelola PBJ Ahli Pertama		
12	Yudi Priyatna, A.Md 19830401 201001 1 021 Penata Muda Tk. I (III/b) Pranata Barang dan Jasa		

13	Bayu Nugroho, S.E 19860730 202203 1 001 Penata Muda (III/a) Pengelola PBJ Ahli Pertama		
14	Erma Herliana, S.E 19881205 202203 2 001 Penata Muda (III/a) Pengelola PBJ Ahli Pertama		
15	Bayu Nugroho, S.E 19860730 202203 1 001 Penata Muda (III/a) Pengelola PBJ Ahli Pertama	1. Sekretariat Daerah 2. Kecamatan Haruai 3. Kecamatan Muara Uya 4. Kecamatan Bintang Ara 5. Kecamatan Jaro	1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung Langsung;
16	Erma Herliana, S.E 19881205 202203 2 001 Penata Muda (III/a) Pengelola PBJ Ahli Pertama	6. Kecamatan Upau 7. Kecamatan Murung Pudak 8. Kecamatan Tanta 9. Kecamatan Banua Lawas 10. Kecamatan Tanjung 11. Kecamatan Pugaan 12. Kecamatan Muara Harus 13. Kecamatan Kelua	2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 4. melaksanakan <i>E-purchasing</i> yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
17	Mariatul Kiptiah, SE 19901210 202321 2 041 Penata Muda (III/a) Pengelola PBJ Ahli Pertama	1. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 2. Badan Pendapatan Daerah 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6. Inspektorat 7. Sekretariat DPRD 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 12. Dinas Kesehatan (hanya sumber dana APBD) 13. Dinas Perhubungan 14. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 15. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 16. Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	melaksanakan <i>E-purchasing</i> yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
18	Erlinda Sari, S.E. 19910821 202321 2 034 Penata Muda (III/a) Pengelola PBJ Ahli Pertama		
19	Herdi Trisnadi, S.Kom 19841003 202321 1 013 Penata Muda (III/a) Pengelola PBJ Ahli Pertama		
20	Nordiana, S.E 19930607 202321 2 045 Penata Muda (III/a) Pengelola PBJ Ahli Pertama		
21	Ahmad Baihaqi, S.Kom 19930502 202321 1 015 Penata Muda (III/a) Pengelola PBJ Ahli Pertama		
22	Muhammad Faisal Hayatus Shalihin, S.Kom 19930908 202321 1 022 Penata Muda (III/a) Pengelola PBJ Ahli Pertama		

		18. Dinas Perkebunan dan Pernakan 19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 20. Dinas Tenaga Kerja 21. Dinas Lingkungan Hidup 22. Dinas Komunikasi dan Informatika 23. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 24. Dinas Sosial 25. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 26. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 27. RSUD H. Badaruddin Kasim (hanya sumber dana APBD) 28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
--	--	--	--	--

Keterangan:

1. Perangkat Daerah No. 1 s.d 28 membuat SK Pejabat Pengadaan sebagaimana Contoh SK Lampiran I dan II, yaitu:
 - a. untuk 14 orang Personel PBJ (No. 1 s.d 14) dengan uraian tugas 1 s.d 3, dan
 - b. untuk 6 orang Personel PBJ (No. 17 s.d 22) dengan uraian tugas hanya melaksanakan *E-purchasing*
2. Khusus untuk Sekretariat Daerah dan Kecamatan membuat SK Pejabat Pengadaan untuk 2 orang Personel PBJ (No. 15 s.d 16) dengan uraian tugas 1 s.d 4 sebagaimana Contoh SK Lampiran III

Lampiran Surat Kabag PBJ Setda Tabalong
Nomor : B. 01 /Setda-BPBJ/500/01/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN

KOP PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA [nama Perangkat Daerah]
KABUPATEN TABALONG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR :

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN
DI LINGKUNGAN [nama SKPD] KABUPATEN TABALONG

KEPALA [nama Perangkat Daerah] KABUPATEN TABALONG SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan [nama Perangkat Daerah] Kabupaten Tabalong, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan (PP);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala [nama Perangkat Daerah] Kabupaten Tabalong selaku Pengguna Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 09);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan (PP) di Lingkungan [nama Perangkat Daerah] Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : PP sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana termuat pada kolom Uraian Tugas pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, PP bertanggungjawab kepada Kepala [nama Perangkat Daerah] Kabupaten Tabalong selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran [nama Perangkat Daerah] Kabupaten Tabalong.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2025

KEPALA [nama Perangkat Daerah] SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN,

.....
Pembina Utama
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabalong (sebagai laporan) di Tanjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung;
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabalong di Tanjung;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA [nama
Perangkat Daerah] KABUPATEN TABALONG SELAKU
PENGUNA ANGGARAN

NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN (PP) DI LINGKUNGAN [nama
Perangkat Daerah] KABUPATEN TABALONG

No.	Nama/NIP	Uraian Tugas
1	Syarif Hidayat, SST, MP 19720409 199803 1 004 Pembina (IV/a) Pengelola PBJ Ahli Muda	1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung 2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2	H. Zain Lukman Hakim, SST 19750314 199303 1 004 Penata Tk.1 (III/d) Pengelola PBJ Ahli Muda	
3	Fahrurazi, ST 19720116 200501 1 012 Penata Tk.1 (III/d) Pengelola PBJ Ahli Muda	
4	Muhammad Husain, ST 19740102 199703 1 002 Penata Tk.1 (III/d) Pengelola PBJ Ahli Muda	
5	H. Akhmad Munazir, ST 19800607 201001 1 023 Penata Tk.1 (III/d) Pengelola PBJ Ahli Muda	
6	Hendra Yudha Gunawan, ST 19830917 200904 1 001 Penata Tk.1 (III/d) Pengelola PBJ Ahli Muda	
7	Hidayatul Fitri, S.Sos 19750712 200604 1 028 Penata Tk.1 (III/d) Pengelola PBJ Ahli Muda	
8	Khairul Mashudi, SE 19820116 201001 1 022 Penata (III/c) Pengelola PBJ Ahli Muda	
9	Agus Dwi Admojo, ST 19800815 201001 1 012 Penata Muda Tk. I (III/b) Pengelola PBJ Ahli Pertama	
10	Syamsir Rahman, SP 19791210 200312 1 007 Penata Muda Tk. I (III/b) Pengelola PBJ Ahli Pertama	
11	Fathur Rakhman, S. AP 19820516 201001 1 027 Penata Muda Tk. I (III/b) Pengelola PBJ Ahli Pertama	

12	Yudi Priyatna, A.Md 19830401 201001 1 021 Penata Muda Tk. I (III/b) Pranata Barang dan Jasa	
13	Bayu Nugroho, S.E 19860730 202203 1 001 Penata Muda (III/a) Pengelola PBJ Ahli Pertama	
14	Erma Herliana, S.E 19881205 202203 2 001 Penata Muda (III/a) Pengelola PBJ Ahli Pertama	

KEPALA [nama Perangkat Daerah]
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

.....
Pembina Utama
NIP.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA [nama Perangkat Daerah] KABUPATEN TABALONG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN (PP) DI LINGKUNGAN [nama Perangkat Daerah] KABUPATEN TABALONG

No.	Nama/NIP	Uraian Tugas
1	Mariatul Kiptiah, SE 19901210 202321 2 041 Penata Muda (III/a) Pengelola PBJ Ahli Pertama	melaksanakan <i>E-purchasing</i> yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
2	Erlinda Sari, S.E. 19910821 202321 2 034 Penata Muda (III/a) Pengelola PBJ Ahli Pertama	
3	Herdi Trisnadi, S.Kom 19841003 202321 1 013 Penata Muda (III/a) Pengelola PBJ Ahli Pertama	
4	Nordiana, S.E 19930607 202321 2 045 Penata Muda (III/a) Pengelola PBJ Ahli Pertama	
5	Ahmad Baihaqi, S.Kom 19930502 202321 1 015 Penata Muda (III/a) Pengelola PBJ Ahli Pertama	
6	Muhammad Faisal Hayatus Shalihin, S.Kom 19930908 202321 1 022 Penata Muda (III/a) Pengelola PBJ Ahli Pertama	

KEPALA [nama Perangkat Daerah]
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

.....
Pembina Utama
NIP.

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA [nama Perangkat Daerah] KABUPATEN TABALONG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN (PP) DI LINGKUNGAN [nama Perangkat Daerah] KABUPATEN TABALONG

No.	Nama/NIP	Uraian Tugas
1	Bayu Nugroho, S.E 19860730 202203 1 001 Penata Muda (III/a) Pengelola PBJ Ahli Pertama	1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung 2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2	Erma Herliana, S.E 19881205 202203 2 001 Penata Muda (III/a) Pengelola PBJ Ahli Pertama	3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 4. melaksanakan <i>E-purchasing</i> yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

KEPALA [nama Perangkat Daerah]
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

.....
Pembina Utama
NIP.